

**THE IMPACT OF VILLAGE EXPANSION ON SOCIO-ECONOMIC
DEVELOPMENT IN HUTAKALO VILLAGE SUMALATA
DISTRICT IN (2009-2020)**

Lisna Pitoi^{1*}, Helman Manay², Andris K. Malae³

^{1,2,3}Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia
lisnapitoi6@gmail.com^{1*}, *helman@ung.ac.id*², *andrismlae91@gmail.com*³

**Corresponding author*

Manuscript received June 5, 2025; revised July 18, 2025; accepted July 22, 2025; Published July 23, 2025

ABSTRACT

This study aims to determine and describe the impact of the expansion and socio-economic development of Hutakalo Village in the period 2009 to 2020. The issues raised include how the process of expansion of Hutakalo Village in 2009-2010 and how the impact of socio-economic development after the expansion of the village in 2009-2020. The research method used is the historical research method, which includes the stages of heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. Heuristics is carried out by collecting data through primary and secondary sources. Source criticism is applied through analysis of written and unwritten sources. The interpretation stage involves combining and analyzing data obtained from primary and secondary sources, and the results of the researcher's observations. The final stage, historiography, is the compilation of research results based on the stages of heuristics, source criticism, and interpretation. The results of this study indicate that the ratification of Hutakalo Village through the Regional Regulation of North Gorontalo Regency Number 66 of 2010, which was then inaugurated in 2011. After the expansion, Hutakalo Village experienced development in various sectors. In the social aspect, namely the Level of Education and the Level of Population Growth that is consistent every year, while in the economic aspect, namely the increase in the number of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) shows an improvement in the socio-economic conditions of the community after the expansion and the level of development in Hutakalo Village.

Keywords: *Expansion, socio-economic development, Hutakalo Village*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan dampak pemekaran serta perkembangan sosial ekonomi Desa Hutakalo dalam kurun waktu 2009 hingga 2020. Permasalahan yang diangkat meliputi bagaimana proses pemekaran Desa Hutakalo pada tahun 2009-2010 serta bagaimana dampak perkembangan sosial ekonomi setelah pemekaran desa tersebut pada tahun 2009-2020. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sejarah, yang mencakup tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Heuristik dilakukan dengan mengumpulkan data melalui sumber primer dan sekunder. Kritik sumber diterapkan melalui analisis terhadap sumber tertulis dan tidak tertulis. Tahap interpretasi melibatkan penggabungan dan analisis data yang diperoleh dari sumber primer, sekunder, dan hasil observasi peneliti. Tahap akhir, historiografi, merupakan penyusunan hasil penelitian berdasarkan tahapan

heuristik, kritik sumber, dan interpretasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengesahan Desa Hutakalo melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 66 Tahun 2010, yang kemudian diresmikan pada tahun 2011. Pasca pemekaran, Desa Hutakalo mengalami perkembangan di berbagai sektor. Dalam aspek sosial yaitu Tingkat Pendidikan serta Tingkat pertumbuhan penduduk yang konsisten setiap tahun, sedangkan pada aspek ekonomi yaitu, peningkatan jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menunjukkan adanya perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat pasca pemekaran serta tingkat pembangunan yang ada di Desa Hutakalo.

Kata Kunci: *Pemekaran, perkembangan sosial ekonomi, Desa Hutakalo*

PENDAHULUAN

Desa adalah komunitas hukum yang memiliki wilayah dengan batas yang jelas dan memiliki hak untuk menyelenggarakan serta mengatur urusan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat setempat. Hak tersebut berasal dari inisiatif masyarakat, warisan historis, serta tradisi yang diakui dan dijunjung tinggi dalam tata pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seluruh aspek yang berkaitan dengan struktur pemerintahan desa tentu berdampak pada kehidupan masyarakat desa. Namun, perlu disadari bahwa desa masih menghadapi berbagai tantangan, seperti masalah struktur pemerintahan, kondisi ekonomi yang belum stabil, dan keterbatasan sumber daya manusia. Meskipun demikian, desa tetap memiliki keunggulan dalam bentuk tradisi, budaya sosial, dan politik yang menjadi kekuatan sosial (modal sosial) untuk bertahan dalam menghadapi berbagai persoalan dan intervensi dari tingkat pemerintahan di atasnya (supradesa) (Ramlan & Eka, 2021).

Pemekaran desa yang marak terjadi di berbagai wilayah Indonesia setidaknya memberikan pengaruh terhadap pembangunan infrastruktur pedesaan. Dampak dari pembangunan ini memiliki dua sisi, baik positif maupun negatif. Di sisi positif, pemekaran dapat memperpendek rentang kendali pelayanan pemerintah sehingga lebih mudah dijangkau, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, memperbaiki kondisi kesehatan dan gizi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, serta mendorong pengembangan kualitas sumber daya manusia, pembangunan distrik, dan kesadaran pendidikan politik. Sementara itu, dari sisi negatif, pemekaran desa juga berpotensi menimbulkan konflik sosial, memicu persaingan tidak sehat antar elit politik lokal, serta meningkatkan risiko terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (Setyanti, 2020).

Berbicara pemekaran wilayah dalam skala lebih kecil, desa juga termasuk wilayah yang bisa dimekarkan. Pemekaran desa merupakan suatu proses pembagian, pemekaran maupun penggabungan wilayah dilakukan atas inisiatif masyarakat dengan mempertimbangkan nilai-nilai adat, asal-usul, serta kondisi sosial dan budaya setempat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000, pemekaran desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, mempercepat proses pembangunan, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mengurangi ketimpangan sosial. Diharapkan, melalui pemekaran desa, dapat tercipta kemandirian serta kemajuan di wilayah

tersebut (Jannah & Ramadhan, 2023).

Pemekaran wilayah pada hakikatnya adalah upaya untuk memperbaiki kualitas dan intensitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam kerangka pembangunan wilayah, sangat penting agar daerah baru yang dibentuk memiliki ketersediaan sumber daya yang relatif seimbang, guna mencegah terjadinya kesenjangan yang mencolok di masa mendatang. Selain itu, proses pemekaran juga bertujuan menciptakan ruang publik sebagai kebutuhan bersama seluruh warga di wilayah yang baru terbentuk. Keberadaan ruang publik ini akan memengaruhi aktivitas masyarakat, di mana sebagian merasa diuntungkan, sementara yang lain mungkin merasakan perubahan akibat pergeseran pusat pelayanan pemerintahan yang menyebabkan jarak tempuh mereka berubah (Begovic, 2023).

Begitu juga dengan pemekaran wilayah atau desa di salah satu Kecamatan Sumalata yaitu, pemekaran Desa Hutakalo. Pemekaran Desa Hutakalo tujuannya adalah untuk mendorong pemerataan bangunan serta mendekatkan layanan publik kepada masyarakat dan penyediaan infrastruktur kepada masyarakat. Terutama yang berada di tingkat administrasi paling bawah yang sebelumnya masih menyatu dengan Desa Bulontio Timur, adapun sekarang ini Desa Hutakalo sudah bisa memberikan layanan publik kepada masyarakatnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada seluruh warga negara dan penduduk guna memenuhi hak serta kebutuhan dasar mereka. Kewajiban ini sejalan dengan amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Rilyawanti Abjul (2025) pada tahun 2009, Desa Hutakalo mengalami proses pemekaran yang merupakan perjalanan panjang dan tidak mudah. Rencana pemekaran ini terdengar oleh seluruh tokoh masyarakat, dan hal tersebut memantik perhatian serta keterlibatan langsung dari tokoh-tokoh seperti Yahya Jauhari, Kardi Loanga, dan Rilyawati Abjul. Proses pemekaran ini memerlukan dukungan penuh dari seluruh masyarakat Desa Hutakalo. Oleh karena itu, para tokoh masyarakat membentuk sebuah panitia khusus yang bertugas merencanakan pemekaran Desa Hutakalo melalui jalur pemerintahan Desa Bulontio Timur.

Alasan adanya pemekaran Desa Hutakalo ini karena pada saat itu pemerintahan Desa Bulontio Timur mendengar isu adanya pemekaran Kecamatan Sumalata sehingga aparat pemerintah Desa Bulontio Timur dan tokoh-tokoh yang terlibat langsung dalam pemekaran ini mempunyai ide untuk memekarkan satu desa lagi yaitu, Desa Hutakalo, adapun tokoh-tokoh yang terlibat langsung dalam pemekaran ini yaitu, Yahyah Djauhari, Widiyanto Badu, Rilyawanti Abjul, dan aparat Desa Bulontio Timur lainnya. Setelah itu pengaruh lain dimekarkan Desa Hutakalo ini karena, terbentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 mengenai pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo bertujuan untuk mendorong perbaikan layanan di sektor pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan. Selain itu, pembentukan kabupaten ini diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan potensi wilayah, khususnya di kawasan-kawasan kecil yang berada di sekitarnya.

Tidak hanya itu, tujuan dari Yahyah Djauhari (2025) ingin memekarkan Desa Hutakalo agar Desa Hutakalo dapat berdiri sendiri, mengingat pada saat itu jumlah penduduk di Desa Bulontio Timur sudah sangat banyak. Setelah disepakati bersama, masyarakat kemudian mengajukan proposal pemekaran desa. Musyawarah dalam proses pemekaran Desa Hutakalo dilaksanakan di Kantor Desa Bulontio Timur sebagai tempat utama pengambilan keputusan bersama. Tepat pada tahun 2011, Gubernur Provinsi Gorontalo Utara menyetujui proposal tersebut, dan Desa Hutakalo resmi dimekarkan. Pemekaran ini dimungkinkan karena jumlah penduduk di wilayah tersebut telah memenuhi syarat untuk pembentukan desa baru.

Penelitian ini memperkaya literatur tentang tata kelola pemerintahan desa, khususnya dalam konteks pemekaran wilayah administratif. Hal ini membantu menjelaskan dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi akibat pemekaran. Di fokuskan pada Desa Hutakalo, penelitian ini memberikan data dan analisis berbasis konteks lokal yang spesifik, ini penting untuk pengembangan teori yang lebih sesuai dengan realitas di Indonesia atau daerah-daerah terpencil. Penelitian ini sangat relevan dalam kajian ilmu pemerintahan, administrasi publik, sosiologi pedesaan, serta perencanaan pembangunan daerah, melihat dari bagaimana perubahan atau perkembangan sosial yang ada di Desa Hutakalo seperti pada Tingkat penduduk maupun pada Tingkat Pendidikan. Penelitian ini juga berfungsi sebagai dasar atau referensi akademik bagi mahasiswa atau peneliti lain yang ingin mengkaji lebih lanjut isu-isu seperti partisipasi masyarakat, konflik wilayah, atau efektivitas layanan publik pasca-pemekaran.

Maka dari itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dinamika perkembangan sosial dan ekonomi yang terjadi di Desa Hutakalo akibat dari pemekaran wilayah tersebut. Fokus pada penelitian ini yaitu, pada perkembangan sosial berupa perkembangan pendidikan, dan perkembangan jumlah penduduk masyarakat Desa Hutakalo. Serta pada perkembangan ekonomi melihat dari perkembangan pembangunan dan perkembangan mata pencaharian masyarakat yang ada di Desa Hutakalo.

METODE PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menguraikan hasil yang ditimbulkan oleh pemekaran desa, serta sosial ekonomi Desa Hutakalo dalam kurun waktu 2009 hingga 2020. Permasalahan yang diangkat meliputi bagaimana proses pemekaran Desa Hutakalo pada tahun 2009-2011 serta bagaimana dampak perkembangan sosial ekonomi setelah pemekaran desa tersebut pada tahun 2009-2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah, yang mencakup tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Heuristik dilakukan dengan mengumpulkan data melalui sumber primer dan sekunder. Kritik sumber diterapkan melalui analisis terhadap sumber tertulis dan tidak tertulis. Tahap interpretasi melibatkan penggabungan dan analisis data yang diperoleh dari sumber primer, sekunder, dan hasil observasi peneliti. Tahap akhir, historiografi, merupakan penyusunan hasil penelitian berdasarkan tahapan heuristik, kritik sumber, dan interpretasi.

Dalam studi ini, peneliti melakukan wawancara dengan sejumlah pihak terkait guna memperoleh informasi mengenai perkembangan Desa Hutakalo dari sisi sosial dan ekonomi. Pada aspek sosial, pembahasan difokuskan pada pertumbuhan penduduk serta peningkatan tingkat pendidikan masyarakat. Sementara dari sisi ekonomi, peningkatan jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi indikator adanya perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah pemekaran. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti kemajuan dalam pembangunan, khususnya di sektor pendidikan dan infrastruktur, yang tercermin dari pembangunan balai desa, penyediaan sarana pendidikan, tempat ibadah, hingga pengembangan objek wisata. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam memahami dinamika pemekaran dan perkembangan desa di wilayah lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Proses pemekaran Desa merupakan bagian dari kebijakan pemerintah daerah dalam upaya pemerataan pembangunan dan pelayanan administrasi serta keinginan dari masyarakat Hutakalo itu sendiri, dan juga sesuai dengan peraturan pemerintah, nomor 129, Tahun 2000 antara lain kenaikan ekonomi serta jumlah penduduk, dan luas daerah itu sendiri (Yunus et al., 2023). Sementara itu, menurut Yahyah Djauhari (2025) perkembangan Desa Hutakalo dalam satu dekade terakhir mencakup aspek sosial ekonomi yang mengalami kemajuan secara bertahap. perkembangan ini dipengaruhi oleh peran aktif masyarakat, dukungan pemerintah, serta program-program pembangunan desa yang berkelanjutan. Baik itu dalam pembangunan rumah layak huni, pembangunan kantor desa, serta kemajuan dalam UMKM masyarakat Desa Hutakalo, serta pembangunan-pembangunan lainnya. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam memahami dinamika pemekaran dan perkembangan desa di wilayah lainnya.

A. Kondisi Sosial dan Ekonomi Desa Hutakalo

1. Aspek sosial
 - a. Tingkat Pendidikan

Pendidikan mencakup seluruh proses pembelajaran yang berlangsung dalam berbagai lingkungan dan terus terjadi sepanjang hayat. Secara lebih luas, pendidikan mencerminkan seluruh kondisi kehidupan yang berperan dalam membentuk dan mengembangkan individu. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita akan mengalami berbagai pengalaman, baik yang menguntungkan maupun tidak. Namun, tidak semua pengalaman tersebut tergolong sebagai pendidikan. Hanya pengalaman yang bersifat membangun dan memberikan dampak positif yang dapat disebut sebagai bagian dari proses pendidikan, karena bertujuan untuk meningkatkan nilai dan martabat manusia (Waini, 2023).

Merujuk pada data yang ditampilkan dalam Tabel 1 di bawah, tingkat pendidikan masyarakat di Desa Hutakalo menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Sebagian besar penduduk memperoleh pendidikan hingga jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Akan tetapi, hanya sebagian kecil yang berhasil melanjutkan ke

tingkat diploma maupun sarjana (S1). Rendahnya partisipasi pada jenjang pendidikan tinggi ini disebabkan oleh tingginya biaya pendidikan, yang menjadi kendala utama kurangnya motivasi untuk melanjutkan studi. Selain itu, kondisi ekonomi masyarakat yang masih lemah turut menjadi faktor penghambat akses terhadap pendidikan tinggi.

Tabel 1. Data Tingkat Pendidikan Penduduk

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	SD	178 orang
2.	SLTP	63 orang
3.	SLTA	71 orang
4.	Diploma/Sarjana	2 orang

Sumber: RPJM Desa Hutakalo 2012-2018

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah desa berupaya mendorong masyarakat agar tetap melanjutkan pendidikan, antara lain dengan memanfaatkan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan mendorong pendaftaran beasiswa. Hingga tahun ini, sudah ada dua orang warga Desa Hutakalo yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga jenjang sarjana. Kepala Desa Hutakalo berharap ke depannya masyarakat semakin sadar akan pentingnya pendidikan dan lebih berusaha untuk mengupayakan pendidikan anak-anak mereka sampai ke tingkat yang lebih lanjut. Berdasarkan data yang diperoleh, upaya yang dilakukan oleh Kepala Desa Hutakalo dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat terbukti berhasil, terlihat dari meningkatnya jumlah warga yang menempuh pendidikan serta berkurangnya angka buta huruf. Hal ini merupakan dampak positif dari pembangunan sekolah yang telah dilaksanakan di Desa Hutakalo, yang memberikan akses pendidikan lebih luas bagi masyarakat setempat.

b. Tingkat Pertumbuhan Jumlah Penduduk

Pertumbuhan penduduk merujuk pada peningkatan jumlah penduduk dalam suatu kurun waktu tertentu. Tingkat pertumbuhan ini ditentukan oleh laju pertumbuhan penduduk, yaitu suatu nilai yang menunjukkan jumlah tambahan penduduk per 1.000 jiwa setiap tahunnya. Sebagai ilustrasi, menurut data BPS tahun 2020, laju pertumbuhan penduduk di Indonesia mencapai 1,25%. Artinya, dalam setiap 1.000 penduduk, terjadi penambahan sekitar 12,5 orang setiap tahun. Dengan demikian, dalam satu tahun terjadi pertambahan penduduk sebanyak 12,5 orang per 1.000 penduduk. Sebagaimana telah diketahui, hampir seluruh perencanaan pembangunan memerlukan dukungan data mengenai jumlah, sebaran, dan struktur penduduk berdasarkan kelompok usia yang sesuai dengan rencana dimaksud (Florentina, 2020).

Seperti halnya dengan pertumbuhan penduduk yang ada di Desa Hutakalo. Jumlah penduduk merupakan tolak ukur untuk melihat adanya perkembangan di Desa Hutakalo, penduduk Desa Hutakalo merupakan kelompok masyarakat yang termasuk dalam suku

Gorontalo. Kehidupan masyarakat Desa Hutakalo ini sama dengan kehidupan masyarakat yang ada di desa pada umumnya. Kehidupan masyarakat Desa Hutakalo tidak terlepas dari norma-norma agama dan nilai-nilai luhur pancasila, dan budaya serta adat istiadat tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat karena memiliki peran yang sangat penting untuk kehidupan masyarakat Desa Hutakalo, adapun jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Desa Hutakalo dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2014	371	350	721
2	2015	377	357	734
3	2016	381	362	743
4	2017	381	364	745
5	2018	386	384	770
6	2020	387	386	773

Sumber: Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk Desa Hutakalo

Berdasarkan data penduduk Desa Hutakalo di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk dari tahun 2014 sampai dengan 2020 mulai meningkat, jumlah penduduk di tahun 2020 sebanyak 773 jiwa yang terdiri dari tiga dusun yaitu Dusun Mokonow, Dusun Balabatu, Dusun Popaya, dan Dusun Lomuli. Jumlah penduduk meningkat dari tahun ke tahun dikarenakan lebih banyak jumlah kelahiran dibandingkan dengan jumlah kematian. Dengan bertambahnya jumlah penduduk di Desa Hutakalo ini membuat pemerintah desa khususnya kepala Desa Hutakalo lebih meningkatkan kinerjanya agar pembangunan-pembangunan bisa berjalan, serta keinginan penduduk bisa terpenuhi dengan mendapatkan bantuan lainnya berupa bibit jagung, dan cabai dari pemerintah desa untuk para petani yang berkebun sebagai salah satu pekerjaan mereka dalam mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Penduduk di desa ini sebagian petani atau pekebun, namun juga ada yang bekerja sebagai pedagang, wiraswasta, buruh nelayan dan ada juga beberapa yang berprofesi sebagai guru ataupun sebagai aparat desa.

2. Aspek Ekonomi

a. Tingkat Pendapatan Masyarakat

Pengembangan sektor ekonomi di Desa Hutakalo bukan hanya sebagai petani dan nelayan saja tetapi ada sebagian masyarakat yang memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pekerjaan tambahan untuk bisa memenuhi kehidupan sehari-hari. Adapun penelitian di lapangan dengan wawancara bersama Misna (2025), diketahui bahwa UMKM masyarakat desa telah mengalami perkembangan yang signifikan dan mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. (Misna, 2025) sendiri telah menjalankan usahanya sejak tahun 2011, dan hingga kini usahanya terus berkembang. Dengan pendapatan harian yang mencapai sekitar 2 juta rupiah, usahanya

menjadi salah satu contoh keberhasilan UMKM desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga dan memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitarnya.

Selain itu juga, perekonomian desa mencakup berbagai aktivitas yang memiliki nilai ekonomi dan berpotensi menjadi penggerak utama roda ekonomi di tingkat desa. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi yang berlangsung tidak terbatas pada sektor pertanian semata. Pernyataan tersebut mencerminkan kondisi nyata desa pada masa kini, salah satu strategi dalam membangun desa adalah dengan mendorong tumbuhnya kreativitas melalui pengembangan sektor ekonomi dan industri kreatif. Seiring dengan kemajuan teknologi, masyarakat desa kini tidak hanya berfokus pada profesi sebagai petani atau nelayan. Berbagai sektor usaha seperti kewirausahaan (UMKM) dan industri kreatif mulai menjadi penopang utama dalam meningkatkan perekonomian desa. Pertumbuhan sektor-sektor ini turut memperluas jenis lapangan pekerjaan yang tersedia di pedesaan (Idayu et al., 2021).

Berkembangnya UMKM di Desa Hutakalo, Desa Hutakalo juga mendapatkan bantuan pembangunan-pembangunan berupa rumah layak huni (mahyani). Tujuan dari pembangunan ini untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial, dan meningkatkan stabilitas sosial. (Agus Damali, 2025) menjelaskan bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Dusun Popaya dan Dusun Lomuli yaitu pembangunan perehapan rumah layak huni pada tahun 2017 dan 2020, pembangunan tempat air bersih pada tahun 2014, dan pembangunan WC tahun 2015 dan tahun 2022. Pada tahun 2017 dilakukan perehapan rumah layak huni yang ada di Dusun Popaya dan Lomuli pada tahap kesatu, dan pada tahap kedua dilaksanakan pada tahun 2020.

b. Tingkat Pembangunan Desa Hutakalo

Pembangunan dipahami secara kontekstual dan bersifat dinamis, sehingga perlu didefinisikan ulang secara berkelanjutan sesuai dengan perkembangan pemahaman kita terhadap proses pembangunan serta tantangan baru yang muncul. Sejak awal, teori pembangunan telah berkaitan erat dengan strategi pembangunan, yaitu perubahan dalam struktur ekonomi dan sistem sosial yang bertujuan untuk memberikan solusi berkelanjutan terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi para pengambil kebijakan di suatu masyarakat. Pembangunan sering dipandang sebagai bentuk konkret dari pelaksanaan kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah. Sementara itu, kebijakan pembangunan merupakan pendekatan untuk mengidentifikasi dan menangani isu-isu tertentu guna mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan, biasanya terdapat berbagai pertimbangan yang rumit. Kebijakan serta pelaksanaan program pembangunan sendiri umumnya merupakan hasil kesepakatan dari berbagai pihak yang terlibat, yang mempertimbangkan aspek politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan sesuai dengan kepentingan masing-masing (Damanik, 2019).

Perencanaan pembangunan daerah tidak sekadar merujuk pada rencana yang berasal dari suatu wilayah, melainkan merupakan perencanaan yang ditujukan bagi

kemajuan wilayah tersebut. Proses ini berfokus pada upaya meningkatkan efektivitas pemanfaatan sumber daya yang tersedia di daerah, baik sumber daya publik maupun penguatan kapasitas sektor swasta agar mampu mengelola dan menciptakan nilai dari sumber daya milik swasta secara bertanggung jawab. Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, suatu wilayah dipandang sebagai satu kesatuan ekonomi yang terdiri atas berbagai elemen yang saling berinteraksi dan memengaruhi (Kuncoro, 2018).

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bersifat dinamis dan dalam jangka menengah hingga panjang, akan menyebabkan perubahan dalam struktur sosial dan ekonomi masyarakat pedesaan. Perubahan ini bisa meliputi pergeseran antar sektor atau jenis pekerjaan, perubahan dalam kelembagaan, serta pergeseran nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Berdasarkan analisis data makro, terlihat bahwa perubahan struktur ekonomi antar sektor berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan perubahan distribusi tenaga kerja (Djoko et al., 2017).

Pembangunan ekonomi biasanya diartikan sebagai peningkatan pendapatan perkapita, dan laju perkembangannya diukur melalui pertumbuhan. Produk Domestik Bruto (PDB) pada level nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di tingkat daerah merupakan indikator penting dalam menilai pertumbuhan ekonomi. Secara umum, konsep pembangunan memiliki keterkaitan yang kuat dengan pembangunan ekonomi, karena keduanya bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Perbedaan terletak pada cakupan: pembangunan ekonomi berfokus pada upaya masyarakat dalam mengembangkan aktivitas ekonomi dan menaikkan pendapatan, sedangkan pembangunan dalam arti luas mencakup aspek-aspek material dan finansial dalam kehidupan sosial masyarakat (Arfianto & Balahmar, 2014).

Menurut Yahyah Djauhari (2025) selaku kepala Desa Hutakalo yang merupakan tokoh penting dalam pemekaran desa. Menurutnya Desa Hutakalo disahkan oleh PERDA Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 66 pada tahun 2010, dan diresmikannya desa ini pada tahun 2011, Desa Hutakalo mengalami proses pemekaran yang merupakan perjalanan panjang dan tidak mudah. Rencana pemekaran ini terdengar oleh seluruh tokoh masyarakat, dan hal tersebut memantik perhatian serta keterlibatan langsung dari tokoh-tokoh seperti Yahya Jauhari, Kardi Loanga, dan Rilyawati Abjul. Proses pemekaran ini memerlukan dukungan penuh dari seluruh masyarakat Desa Hutakalo. Oleh karena itu, para tokoh masyarakat membentuk sebuah panitia khusus yang bertugas merencanakan pemekaran Desa Hutakalo melalui jalur pemerintahan Desa Bulontio Timur, adapun dari pemekaran desa ini pembangunan-pembangunan yang ada di Desa Hutakalo sudah lebih meningkat, sehingga Kepala desa memiliki peran penting dalam mendorong masyarakat agar lebih termotivasi untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan, khususnya dalam pembangunan infrastruktur desa. Partisipasi aktif dari masyarakat sangat krusial dalam mendukung keberhasilan pembangunan desa, jika terjadi kesenjangan partisipasi dan hal ini tidak diinginkan oleh pemerintah maupun warga setempat, maka proses pembangunan bisa mengalami hambatan. Oleh karena itu, kepala desa menjadi sosok kunci yang menentukan keberhasilan pembangunan di wilayah yang dipimpinnya (Mustanir et al., 2022).

Pembangunan-pembangunan yang terjadi di Desa Hutakalo antara lain yaitu, Perehapan rumah layak huni, perehapan ini dilakukan secara bertahap ada rumah masyarakat yang direhap pada tahun 2017 dan ada juga yang direhap pada tahun 2020. Awalnya rumah layak huni yang ada di kedua dusun ini masih rumah yang terbuat dari papan, rumah ini sudah ada sejak Desa Hutakalo masih tergabung dengan Desa Bulontio Timur. Tetapi setelah masa pemerintahan bapak Yahyah Djauhari dilaksanakannya perehapan atau renovasi untuk memastikan kondisi rumah memenuhi standar kenyamanan, dan kesehatan bagi penghuninya, dan rumah tersebut dapat digunakan dengan aman, nyaman dalam jangka waktu yang panjang untuk masyarakat yang ada di kedua Dusun tersebut, ujarnya (Agus Damali, 2025).

Selain perehapan rumah layak huni menurut Rilyawanti Abjul (2025) pemerintah Desa Hutakalo juga melaksanakan pembangunan tempa air bersih pada tahun 2014. Yang memiliki tujuan untuk menyediakan sumber air yang aman, sehat, dan terjangkau bagi masyarakat. Yang berguna untuk mendukung kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup, melihat keadaan masyarakat yang ada di Desa Hutakalo yang jauh dari sumber mata air, maka pemerintah desa berupaya agar membangun tempat air bersih untuk digunakan masyarakat supaya tidak lagi kesulitan dalam memperoleh air bersih untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari.

Bukan hanya itu juga, di Desa Hutakalo dilaksanakan pembangunan WC di setiap rumah secara bertahap menurut wawancara dengan salah satu aparat desa atau yang terlibat langsung dalam Pembangunan serta pemekaran Desa Hutakalo yaitu, Widiyanto Badu (2025) menurutnya pembangunan tersebut dimulai pada tahun 2015 dan berlanjut hingga tahun 2022. Pembangunan WC ini dilakukan setiap kali Dana Desa dicairkan. Masyarakat menerima bantuan pembangunan WC secara bergiliran sebagian mendapatkannya pada tahun 2015, dan sebagian lainnya pada tahun 2022. Program bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sanitasi dan kesehatan lingkungan di daerah yang membutuhkan. Dengan adanya bantuan ini, pemerintah desa berharap setiap warga dapat memiliki fasilitas WC yang layak, sehingga dapat mendukung kehidupan yang lebih bersih dan sehat.

Pada tahun 2013, menurut wawancara dengan Yahyah Djauhari (2025) selaku tokoh yang terlibat dalam pembangunan desa. Ia mengatakan bahwa pembangunan dari rumah warga yang sebelumnya digunakan sebagai kantor desa sementara, menjadi kantor desa yang lebih layak dan representative. Dulunya, bangunan yang kini menjadi Kantor Desa Hutakalo merupakan rumah milik salah satu warga setempat. Rumah tersebut memiliki nilai historis bagi masyarakat sekitar karena sering dijadikan tempat berkumpul dan musyawarah sebelum desa memiliki fasilitas resmi. Seiring waktu dan perkembangan kebutuhan administrasi, pemerintah desa memutuskan untuk membeli tanah dan bangunan tersebut guna dijadikan kantor pelayanan masyarakat. Setelah proses pembelian selesai, bangunan lama direnovasi total dan direhabilitasi menjadi Kantor Desa Hutakalo yang lebih representatif dan fungsional. Kini, kantor tersebut menjadi pusat kegiatan pemerintahan desa, tempat pelayanan administrasi, serta wadah aspirasi

masyarakat. Perubahan ini menandai kemajuan desa dalam menyediakan sarana pelayanan yang lebih baik dan profesional bagi warganya.

Berikutnya ada pembangunan Masjid yang kini berdiri megah di tengah Dusun dulunya merupakan bangunan sederhana yang terbuat dari papan sejak didirikan pada tahun 2006, Menurut wawancara dengan (Widiyanto Badu, 2025) selaku Kepala Dusun Popaya. Meskipun tampak sederhana, masjid papan tersebut menjadi pusat ibadah dan kegiatan keagamaan warga, serta menyimpan banyak kenangan akan kebersamaan dan kekhidmatan dalam beribadah. Seiring berjalannya waktu dan meningkatnya jumlah jamaah, masyarakat bersama pemerintah desa berinisiatif untuk merenovasi masjid tersebut pada tahun 2018, dengan semangat gotong royong, masjid pun dibangun ulang menggunakan material batuan yang lebih kokoh dan tahan lama. Selain sebagai tempat pelaksanaan ibadah, masjid tersebut juga berperan dalam kegiatan lainnya, akan tetapi juga menjadi simbol kemajuan dan kekompakan warga dalam membangun fasilitas keagamaan yang layak dan nyaman. Setelahnya ada juga pembangunan wisata pantai Milango pada Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Hutakalo beserta masyarakatnya bertujuan untuk meningkatkan daya tarik wisata dengan fasilitas yang lebih moderen dan ramah lingkungan, dengan potensi alam yang indah kawasan ini diharapkan menjadi destinasi favorit yang mendukung pertumbuhan ekonom lokal dan berkelanjutan ekosistem.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa perkembangan sejarah yang terlihat dalam dinamika masyarakat muncul akibat adanya berbagai kekuatan sejarah (Darsono et al., 2024). Kekuatan tersebut bisa bersifat alamiah, seperti keberadaan atau ketiadaan sumber-sumber ekonomi, pertumbuhan populasi, kepentingan dari kelompok, maupun individu, penemuan teknologi baru, ideologi, perekonomian, pengaruh-pengaruh eksternal, dan lain sebagainya (Birsyada & Permana, 2020). Sejarah menggambarkan runtutan peristiwa yang memiliki keterkaitan satu sama lain serta menunjukkan hubungan sebab dan akibat. Maka, sejarah tidak hanya mengandung generalisasi seperti pada pendekatan nomotetis, tetapi juga memperlihatkan ciri khas dari pendekatan ideografis, tetapi juga menonjolkan keunikan-keunikan dari ilmu yang bersifat ideografis. Maka, sangat penting bagi sejarawan untuk mengembangkan model yang paling tepat guna menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi dalam dinamika sosial-sejarah suatu masyarakat.

Pemekaran Kabupaten Gorontalo Utara memiliki imbas besar terhadap pemekaran-pemekaran daerah kecil lainnya salah satunya adalah pemekaran Desa Hutakalo yang buah dari Desa Bulontio Timur yang ada di Kecamatan Sumalata, sehingga Desa Bulontio Timur memekarkan dua desa lagi yakni, Desa Pulahenti dan Desa Hutakalo pada tahun 2010 yang disahkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 66 (PERDA) pada tahun 2010. Penelitian ini merupakan kajian terbaru yang secara khusus menyoroti proses dan dampak pemekaran Desa Hutokalo, yang dimekarkan pada tahun 2010 dan resmi disahkan pada tahun 2011, mengingat hingga saat ini belum terdapat studi terdahulu yang membahas topik tersebut secara mendalam sehingga peneliti dapat melakukan penelitian tersebut. Manfaat penelitian ini adalah

memberikan peluang bagi mahasiswa untuk berkolaborasi dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, dan BPD. Serta membantu memahami kondisi sosial ekonomi masyarakat secara langsung, dan mengasah keterampilan peneliti dalam Teknik wawancara dan observasi.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengesahan Desa Hutakalo melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 66 Tahun 2010, yang kemudian diresmikan pada tahun 2011, merupakan bagian dari kebijakan strategis pemerintah daerah untuk mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan pelayanan administrasi, serta untuk menyediakan sesuatu yang diinginkan masyarakat setempat. Pasca pemekaran, Desa Hutakalo mengalami perkembangan di berbagai sektor. Dalam bidang politik, terdapat peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan kepala desa dan kepala dusun, meskipun dinamika internal dan eksternal tetap mewarnai proses tersebut. Pada aspek sosial ekonomi, pertumbuhan jumlah penduduk yang konsisten setiap tahun serta peningkatan jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menunjukkan adanya perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat pasca pemekaran.

Setelah pemekaran, Desa Hutakalo mengalami perkembangan di berbagai sektor. Pada aspek sosial ekonomi, pertumbuhan jumlah penduduk yang meningkat setiap tahun, serta Pembangunan-pembangunan seperti rumah layak huni, Pembangunan wisata, Pembangunan kantor desa, serta Pembangunan sekolah SD maupun sekolah SMP sudah bisa dikatakan berkembang dari sebelumnya. adapun tujuan dari bantuan ini untuk meringankan beban ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, serta memastikan pemerataan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok lainnya, dalam perkembangan lainnya jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menunjukkan adanya perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat pasca pemekaran. Menurut Misna, Dian, dan Windra selaku pengusaha Mikro, kecil, dan menengah mereka mengatakan bahwa dengan usahanya ini bisa meningkatkan ekonomi keluarga dan bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Damali. (2025). Hasil Wawancara.
- Arfianto, A. E. W., & Balahmar, A. R. U. (2014). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Desa. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 2(1), 53–66. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v2i1.408>
- Begouvic, S. H. M. H. A. (2023). *Hukum Pemekaran Wilayah dalam Kajian Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Pemekaran Kabupaten)*. GUEPEDIA.
- Birsyada, M. I., & Permana, S. A. (2020). The Business Ethics of Kotagede's Silver Entrepreneurs from the Kingdom to the Modern Era. *Paramita: Historical Studies Journal*, 30(2), 145–156. <https://doi.org/10.15294/paramita.v30i2.20691>

- Damanik, A. (2019). Peran Pemerintah Daerah Dalam Memberdayakan Masyarakat Untuk Meningkatkan Pembangunan Daerah. *Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Desa*, 1(2), 171–186. <https://doi.org/10.24952/taghyir.v1i2.1346>
- Darsono, Fahrudin, Birsyada, M. I., Judijanto, L., Muslim, A., Saefudin, A., & Saddhono, K. (2024). Environmental Exploitation in the Colonial Period: An Ecocritical Analysis of Pramoedya Ananta Toer's Buru Quartet. *Theory and Practice in Language Studies*, 14(8), 2455–2464. <https://doi.org/10.17507/tpls.1408.18>
- Djoko, M. A. S. S., Karyana, Y., Karim, N. A., Mirdad, A. J., Fatah, R. H. A., Kusdiana, D., Pamungkas, P., Badranaya, D., & PRESS, U. (2017). *Mobilitas Penduduk Dan Bonus Demografi*. UNPAD PRESS.
- Florentina. (2020). *Buku Ajar Pendidikan Kependudukan Dan Lingkungan Hidup*. Zahir Publishing.
- Idayu, R., Husni, M., & Suhandi, S. (2021). Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa di Desa Nembol Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang Banten. *Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo*, 7(1), 73–85. <https://doi.org/10.35906/jm001.v7i1.729>
- Jannah, M. R., & Ramadhan, B. (2023). Perkembangan Infrastruktur Pasca Pemekaran Desa Teluk Paman Timur Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau. *Jurnal Masyarakat Dan Desa*, 3(1), 69–80. <https://doi.org/10.47431/jmd.v3i1.313>
- Kuncoro, M. (2018). *Perencanaan Pembangunan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Misna. (2025). Hasil Wawancara.
- Mustanir, S. I. P. M. S., Monalisa Ibrahim, S. S. M. A. P., Sofyan B, S. I. P. M. A. P., & Dr. Andi Sadapotto, S. P. M. H. (2022). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan*. Penerbit Qiara Media.
- Ramlan & Eka. (2021). *Hukum Pemerintahan Desa*. Enam Media.
- Rilyawanti Abjul. (2025). Hasil Wawancara.
- Setyanti, A. M. (2020). *Ekonomi Perdesaan*. UB Press.
- Waini. (2023). *Landasan Pendidikan*. UPI Press.
- Widiyanto Badu. (2025). Hasil Wawancara.
- Yahyah Djauhari. (2025). Hasil Wawancara.
- Yunus, R., Manay, H., & Malae, A. K. (2023). *Pohuwato: sejarah dan nilai kebangsaan*. Ideas Publishing.